Hasil-Hasil
MUSYAWARAH BESAR
Nahdliyyin Nusantara

Yogyakarta, 28-29 Januari 2024

N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

HASIL-HASIL MUSYAWARAH BESAR NAHDLIYIN NUSANTARA

28-29 JANUARI 2024

KAMPUNG MATARAMAN, PANGGUNGHARJO
SEWON, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIPERBANYAK OLEH PANITIA MUBES NAHDLIYIN NUSANTARA

"Budal Yu jo melu Mubes Nahdliyin Nusantara"

28-29 Januari 2024, di Kampung Mataraman Yogyakarta.

Daftar Isi

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Kenapa Nahdliyin Nusantara Menyelenggarakan Mubes (28-29/1/2024) ?

Ada beberapa hal mendasar yang menjadikan Nahdliyin Nusantara menggelar Muyawarah Besar di Jogja (28-29 Januari 2024), bersamaan dengan akan diselenggarakannya Konbes NU dan Harlah NU ke-101 di Yogyakarta pada tanggal 28-30 Januari 2024. Menurut Koordinator Mubes Nahdliyin, Hasan Basri Marwah penyelenggaraan Mubes, memiliki alasan-alasan yang sangat penting dan mendasar, yang kemudian disampaikan pada Konferensi Pers tanggal 27 Januari 2024, di Kafe Rakopiran Kandang Menjangan, dekat dengan Pesantren Krapyak, Yogyakarta Hasan Bashri Marwah menyampaikan alasan-alasannya demikian ini:

1. Dasar bersama Khittah NU yang tercederai karena munculnya banyak berita media dan video-video yang beredar di tengah warga NU, memperlihatkan sekali Pengurus Harian NU dan Banom-Banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu secara terbuka; bahkan ada penggalangan secara terselubung dari Jamiyah untuk mendukung Calon tertentu. Hal ini sungguh sangat meresahkan para Nahdliyin, karena penggunaan Jamiyah untuk kepentingan politik praktis;

2. Dasar nilai-nilai Keulamaan yang berpijak pada Ahlussunah Waljama'ah an-Nahdliyyah, selalu menegaskankan arti pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar* (tidak boleh *amar maruf naymbi munkar*) di dalam kancah sosial-kemasyarakatan, sehingga memberikan pengertian nilai-nilai Ulama yang berpijak pada Ahlusnnah waljamaah harus selalu mengedepankan nilai-nilai ulama yang berpijak pada keilmuan (dan etika keilmuan yang harus dijungjung tinggi), kejujuran (tidak boleh berbicara netral tetapi faktanya ada penggalangan untuk Paslon tertentu), keteladanan, kerahmatan, dan mengayomi-merahmati (*ri`ayatul ummah*);

3. Dasar-dasar politik Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah, bukan untuk mencari kemenangan-kemenangan kekuasaan, tetapi untuk penegakkan nilai-nilai moral-akhlak baik di dalam pengelolaan kekuasaan, keadilan dan berdemokrasi yang bersih dari suap menyuap;

4. Adanya hukum-hukum agama yang telah ditetapkan Muktamar NU tahun 1999 dan 2002 tentang "Nasbul imam dan demokrasi" dan tentang "Money Politics", bahwa mengangkat imam itu wajib yang harus disertai dengan penciptaan masyarakatdemokratis dengan penegakan pilar masyarakat sipil yang kuat untuk mencapai *baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur*; sementara praktik politik uang yang begitu marak disebutkan haram dan pengkhianatan, karena politik uang itu *risywah* yang bermakna *lidaf`il haqq litahshilil bathil.*

5. Berdasarkan hubungan di dalam Jam'iyah itu

didasarkan pada AD ART, Khittah NU, dan Qanun Asasi (yang di dalamnya ada akhlak-akhlak bagus Keulamaan), sehingga setiap jenjang kepemimpinan di dalam jam'iyah adalah ranah kebijakan Jamiyah yang juga perlu ditakar melalui ukuran-ukuran ketiganya. Ketaatan Pengurus Jamiyah atas ketiga sumber pokok dalam berorganisasi adalah puncaknya adab dalam berjam`iyah, dan *tawashau bil haq wash shabr* dalam berjam`iyah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dan para Nahdliyin di dalam perjalanan Jam`iyah adalah implementasi dari ketiga sumber di atas. Karena para Nahdliyin adalah pemilih kedaulatan syah Jam`iyah NU, dan pengurus NU adalah mandataris organisasi.

6. Mubes Nahdliyin ingin menyuarakan tentang keharusan taat kepada Khittah NU, Qanun Asasi, dan AD ART NU, agar Jamiyah NU menjadi Jamiyah Kebangkitan Ulama yang memiliki kewibawaan, di mata anggota-anggotanya dan orang-orang luar; dan membicarakan hal-hal penting yang perlu dilakukan semua pilar masyarakat di kalangan Jamiyah NU. Hasan Bashri Marwah menyayangkan bila Jamiyah digunakan sesuai tidak sesuai dengan amanat Khittah NU, dan untuk kepentingan politik praktis, tidak mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan-kerakyatan-lemaslhatan-keumatan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja an-Nadliyah. Rais Aam dan jajaran Syuriah PBNU memiliki hak mutlak menegur dan memberhentikan pengurus PBNU yang terlibat langsung dengan praktek politik praktis dalam Pemilu, dan bahkan pimpinan Jamiyah tidak diperkenankan menginstruksikan

penggunaan NU untuk kepentingan Paslon tertentu; juga tidak diperkenankan untuk penggalangan secara terselubung karena itu mencederai marwah Keulamaan.

Oleh karena itu, Hasan Basri Marwah menyebutkan bahwa dengan dasar pijak di atas, Nahdliyin Nusantara merasa perlu mengadakan Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara, yang diselenggarakan tanggal 28 Januari 2024.[]

Hasil-Hasil Komisi A
NU dan Politik Kemaslahatan

Komisi A membicarakan "NU dan Politik Kemaslahatan" untuk menemukan Pointers yang dapat digunakan bahan acuan membangun kesadaran Nahdliyin dalam megembangkan politik Kemaslahatan Umat, Bangsa, dan Negara. Dari penggalian pandangan-pandangan peserta Komisi A, didapatkan kesimpulan-kesimpulan begini:

A. Berpijak pada Normativitas Konstitusi

1. Tujuan nasional menjadi acuan, yaitu: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Hak-Hak Warga Negara, meliputi: pendidikan, kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, dan jaminan social.
3. Tentang kesejahteraan social disebutkan: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara Negara, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

B. Melihat Realitas Empirik Keindonesiaan

1. Adanya Ketimpangan akut: 4 orang terkaya miliki kekayaan setara harta 100 juta penduduk miskin (data Oxfam & INFID).
2. Adanya korupsi yang semakin merajalela. Jumlah kasus korupsi dan kerugian negara meningkat tajam. Pada 2022, IPK Indonesia anjlok menjadi 34/100, peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, jauh berada di bawah Timor Leste dan Etiopia (TI, 2023).
3. Membanjirnya politik uang: ada sekitar sepertiga pemilih terpapar politik uang. Indonesia ada di peringkat ketiga tertinggi di dunia, di belakang Uganda dan Benin (Muhtadi 2018, Aspinall dan Berencshot, 2019).
4. Indonesia juga menjadi juara 1 korupsi seks/ sextortion dan juara 3 suap menyuap se-Asia, setelah India dan Kamboja (*TI's Global Corruption Barometer Asia,* 2020).
5. Adanya penegakan hukum diskriminatif, kohesi sosial terkoyak, dan tingkat kebahagian merosot tajam (data World Happiness Report).
6. Ekonomi lesu dan tidak berkualitas, tumbuh di bawah 5% sebelum pandemi.
7. Utang negara dan harga-harga kebutuhan pokok meroket.
8. Adanya defisit kebebasan. RI menjadi negara bebas sebagian (*partly free state*), dari sebelumnya *free state*, tertinggal dari Timor Leste (data Freedom House).
9. Kondisi & peringkat demokrasi memburuk. Indeks Demokrasi RI anjlok 16 peringkat. Dari peringkat 48 (2016) ke 64 (2020), jauh di bawah Malaysia dan Timor Leste (yang menuju *full democracy*).

10. IPM Indonesia (0.705) jauh tertinggal dari Malaysia dan Thailand, jauh lebih rendah dari rerata IPM kawasan Asia-Timur dan Pasifik (0.749), ada di peringkat 114 dari 191 negara.
11. Adanya penurunan kemiskinan yang melamban. Jumlah penduduk miskin, rentan miskin dan menengah rentan capai 215 juta jiwa (data BPS, Kemensos, WB), dan ada sekitar 22 juta penduduk lapar kronis selama 2016-2018 (data ADB).

C. Akar Masalah yang Ada

1. Masalah-masalah empirik tersebut bukan karena: penduduk malas, tak terdidik, faktor geografi atau cuaca; SDA; agama atau budaya.
2. Hal tersebut lebih karena: 1) Neoliberalisme global dan kelembagaaan ekonomi-politik nasional yang ekstraktif dengan pembangunanisme (developmentalism) sebagai panglima di bawah kendali oligarki; 2) Ignorant leadership (kepemimpinan serba minus): nir-visi, inkompeten, episentrum oligarki dan korupsi; dan relasi *patron-client* intelektual/agamawan dan negara.
3. Lemahnya NU sebagai masyarakat sipil sehingga gagal menjadi kekuatan kritik terhadap fenomena di atas.

D. Apa yang Menjadi Tugas Sejarah NU?

NU bertugas memastikan menjadi lembaga yang secara internal setia pada *qonun asasi*, Khittah 1926;

dan AD/ART organisasi. Secara eksternal, NU bertugas memastikan negara berpijak pada landasan konstitusional yang mampu menjawab berbagai keterbelakangan nasional dan tantangan global.

1. Basis Nilai Politik Kemaslahatan:

- Basis nilai politik kemashlahatan mengacu pada: *Maqoshid Syariah, Qanun Asasi*, Khittah NU, AD ART;
- Tashoruful imam alar ro'iyyah manuthun bil-maslahah;
- Mabadi Khoiri Ummah.

2. Kontekstualisai Politik Kemaslahatan:

- Menuju Nasionalisme Keadilan dan kemakuran berkelanjutan (keadilan ekonomi, keadilan ekologis, keadilan gender, *rule of law*, ekonomi inklusif dan ramah lingkungan, reforma agraria, koperasi, UMKM, dll.);
- Politik kemaslahatan dengan gagasan-gagasan besar/alternatif dan mampu menerjemahkan *maqoshid syariah* dalam pilihan kebijakan, dan memiliki keberanian politik untuk membongkar sistem ekstraktif dan melawan predator ekonomi politik dalam sistem;
- Mengutamakan demokrasi substansial dan pembangunan manusia Indonesia, didukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur fisik bermuatan kesetaraan dan keadilan social;
- Berperan sebagai katalis perubahan sistem / kelembagaan, dan reformulasi kontrak social;

- Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya sebagai panglima;
- Semangat kebangsaan yang didasari dan berorientasi Pembangunan Manusia Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai titik sentral (pusat) pembangunan, bukan objek dan SDM (faktor produksi) semata ala neoliberalisme dan pembangunanisme (developmentalism).
- Demokrasi substansial (keadilan sosial, ekonomi dan politik), sesuai spirit Pancasila dan Pembukaan UUD45 serta pemikiran para founding fathers.
- De-oligarkisasi ekonomi dan politik–tekan peran ektsraktif oligarki, sumber utama korupsi politik, politik gentong babi, kemiskinan, ketimpangan, ketegangan sosial (horizontal) dan ketegangan vertikal, dinasti politik, penebalan feodalisme dan pengentalan politik identitas, dan lainnya.

3. Prasyarat Politik Kemaslahatan Dapat Terwujud

- Kemandirian mengelola Jamiyah NU, baik ekonomi maupun politik;
- Kelembagaan yang kuat berintegritas;
- Kesetiaan tertinggi Pengelola Jam`iyah yang berpegang teguh pada *Qanun Asasi, Khittah NU*, dan AD/ART organisasi.

Ttd PJ Komisi A:

K. Mustafid
K. Abdul Waidl

Hasil-Hasil Komisi B
NapakTilas 1 Abad Pengabdian NU: Khithah dan AD/ART

Komisi B berusaha menggali perjalanan 1 abad NU untuk menemukan hikmah pentingnya di dalam mengembangkan dan mengelola NU, khususnya diteguhkanya *Qanun Asasi*, Khitah NU, dan AD ART. Dengan menggali pandangan-pandangan dari para peserta Komisi ini, didapatkan kesimpulan-kesimpulan yang disepakati begini:

A. Latar Belakang

Para Muasis Jam`iyah Nahdlatul Ulama mendirikan organisasiini dengan tujuan, yaitu mendamaikan berbagai madzhab yang berkembang di Indonesia, mendirikan pendidikan melalui pesantren, memberdayakan ekonomi dan upaya-upaya mengatasi persoalan sosial yang dalam di tengah masyarakat. Di masa awal kemerdekaan tokoh-tokoh NU memiliki peran menentukan dalam perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Semangat dalam pendirian organisasi NU terhubung langsung dalam pendirian NKRI karena nilai-nilai yang mendasarinya mengarahkan ke sana.

Semangatpersatuan dan cinta tanah air ini pula yang mendorong warga NU sangat mudah terpanggil ambil bagian dalam gerakan revolusi untuk kemerdekaan

Indonesia. Laskar Hizbullah dan Sabilillah adalah di antara organisasi yang dibentuk oleh pengurus NU di masa awal untuk menghadapi pasukan Belanda dan Sekutu, yang dengan keberadaan lanskar-laskar ini negara Indonesia memiliki modal pembentukan tentara nasional Indonesia. Tokoh-tokoh NU juga ambil bagian dalam mendirikan universitas swasta pertama di Indonesia yang menjadi embrio dari Universitas Islam Indonesia.

Pada masa awal NU berhasil merintis jalan bagi realisasi tujuan pendirian organisasi dengan segenap ketulusan, sikap hidup yang zuhud dan semangat untuk mandiri dalam bidang ekonomi melalui aktivitas perdangan, nelayan dan pertanian. Sebagaimana semangat para pendiri bangsa saat itu, perjuangan NU menghidar dari kepentingan politik sesaat, kecuali demi melayani kepentingan umat dengan mengutamakan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Ketika gairah politik sebagian pimpinan NU tidak terbendung dalam perjalan sejarah, yaitu: NU masuk Partai Masyumi, menjadi Partai NU, masuk bergabung dalam PPP, selalu gagal menyuarakan kepentingan warga dan kesulitan merealisasikan tujuan-tujuan pendirian NU. Semangat Khitah 1926 akhirnya menjadi kesepakatan bersama dalam Muktamar 1984 untuk Melahirkan Khitah NU. Ketika gairah politik kekeuasaan tetap tidak pusar di dalam tubuh Nahdliyin, sehingga NU pada masa kepemimpinan Gus Dur melahirkan PKB sebagai wadah berpolitik kalangan NU yang memang ingin berkonsentrasi memperjuangkan kepentingan warga melalui politik praktik; padahal warga NU lainnya juga sudah menyalurkan aspirasinya ke partai-partai lain. Toh dalam wadah PKB ini perpecahan terus

terjadi sehingga cita-cita yang ada dalam Khitah NU tidak dapat terwadahi secara baik organisasi politik.

B. Perubahan Karakter

Kultur masyarakat NU yang berbasis pada tradisi pesantren memiliki penghormatan sangat besar pada Ilmu dan proses belajar dan orang-orang yang memiliki Ilmu. Dalam perkembangannya kultur ini telah bertransformasi dalam bentuk hubungan sosial yang dalam beberapa kasus menjadikan ketaatan tersebut ketaan tanpa pertimbangan rasionalitas kemaslahatan dan hati nurani. Hal ini diungkapkan dalam kesaksian peserta komisi B, khususnya dalam masa kampanye pemilu kali ini, mereka mengalami situasi yang tidak masuk akal ketika diarahkan, bahkan merasa ditekan untuk memilih paslon tertentu tanpa alasan yang logis dan dapat dipertanggunghawabkan.

"Apa yang sebenarnya dicari oleh mereka?" Ungkapan kegelisahan ini disampaikan oleh beberapa anggota Komisi B dari yang berasal dari beberapa daerah ini: mereka mewakili kegelisahan banyak warga dan pengurus yang menyaksikan situasi dimana pikiran yang menjunjung hati nurani dan prinsip-prinsip luhur yang ada dalam ajaran agama dan dididikkan oleh lembaga-lembaga keagamaan, tidak mendapat cukup ruang untuk bersikap secara merdeka, ketika banyak pengurus lain merasa takut atau tidak enak untuk menolak arahan dari atasan. Seorang pengurus LAZIZNU dari daerah di Jawa Tengah merasa ditekan untuk taat dan mengikuti arahan agar memilih paslon. Orang ini merasa tidak dapat mengingkari suara hatinuraninya, namun tidak

memiliki argumentasi untuk berkomunikasi secara setara.

Beberapaa dekade terakhir, hal yang penting untuk menjadi bahan refleksi adalah adanya kecenderungan perubahan terkait mentalitas pengabdian khususnya di kalangan Pengurus NU dari berbagai level. Kesaksian peserta dari Bojonegoro, Jogja, dan Banjarmasin mengatakan, bahwa dulu ada kegiatan-kegiatan di lingkungan Jam`iyah, umumnya dilakukan dengan sangat mandiri meski sederhana. Namun saat ini kesederhanaan dan sikap hidup bersahaja dianggap tidak lagi dianggap menarik. Cara mengelolanya justru dengan sikap “tangan di bawah’ yang dulu diyakini sebagai ahlak yang buruk. Mengedarkan proposal bantuan dan sumbangan pada para pejabat, belakangan juga menjadi hal yang lumrah dan membanjiri pola-pola, termasuk di antaranya terkait meminta jabatan.

Ketidakmadirian terutama dalam bidang ekonomi organisasi disadari bersama menjadi salah satu penyebab banyaka kalangan NU tidak dapat tegak memegang nilai-nilai yang menjadi prinsip yang dulu sangat dijunjung. Peserta komisi B menyadari dibutuhkan pendidikan penyadaran tentang nilai-nilai yang tidak sekedar dipahami tetapi dapat diresapi dan menjadi penggerak transformasi sosial. llmu pengetahuan tidak sekedar dipahami dan dihafalkan namun juga harus menjadi modal transformasi sosial dan diamalkan.

Ketika terjadi penghambaan pada kekuasaan, modal dan Bohir tertentu, peminggiran pada nilai-nilai tampak dalam berubahan-perubahan aturan yang dilakukan untuk melancarkan kepentingan mencapai posisi lekat dengan kekuasaan. Khitah NU sebagai semangat

ishlahihyah/perbaikan gradual dalam gerak perjuangan NU, tidak menjadi daya dorong bila pengetahuan tentang Khitah dan prinsip-prinsip di dalamnya hanya berhenti pada ranah pengetahuan saja, tidak menjadi kesadaran bersama, tidak menjadi amaliah yang diresapi.

Di kalangan generasi muda NU dalam beberapa peserta musyawarah Komisi B yang berasal dari unsur IPNU dan santri-mahasiswa memberi kesaksian bahwa dalam setiap latihan kepemimpinan atau berbagai kegiatan kaderisasi, narasi tentang Khitah yang menjadi bentuk pendidikan politik khas NU, yaitu politik kebangsaan dan kemanusiaan, tidak pernah mereka dapatkan. Ini artinya terjadi penggeseran. Padahal bila generasi muda tidak mendapatkan kerangka berfikir yang ada dalam substansi Khitah NU, maka ketika kelak terjadi estafet kepemimpinan maka perjalanan organisasi tidak lagi bisa dihidupi oleh prinsip-prinsip perjuangan NU yang diamantkan oleh para Muasis Jam`iyah.

C. Rekomenasi-Rekomendasi

Dari hasil refleksi dan menganalisis perkembangan kehidupan Jam`iyah NU dalam menghadapi tantangan sosial-kemasyarakatan dan politik-kenegaraan, peserta komisi B merekomendasikan:

1. Perlunya narasi tentang Khitah NU yang dapat menjadi kerangka berfikir yang dapat menjadi rambu-rambu bagi anggota maupun pengurus NU untuk menyikapi semua masalah. Narasi tentang bagaimana implementasi ajaran Khitah NU ini

menjadi bagian dari pendidikan politik bagi generasi muda NU yang memiliki tantangan nyata yang berbeda dari generasi sebelumnya;

2. Apabila karena situasi dan kondisi terjadi perubahan AD/ART, maka perubahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan *Qanun Asasi* dan Khittah NU; atau ketika melakukan perubahan tertentu, dilakukan justru seharusnya untuk lebih menguatkan semangat *Qanun Asasi* dan Khittah NU dalam AD/ART yang baru. Sebab bila AD/ART diubah hanya untuk mewadahi kepentingan jangka pendek dan menjauh dari semangat dasarnya maka bangunan organisasi dengan sendirinya akan lemah dan membuka peluang keretakan internal;
3. Perlunya melakukan penyadaran pada semua lapisan warga NU tentang pentingnya mentalitas kemandirian, bahwa semua orang akan diminta pertanggung jawaban atas sikap hidupnya di akhirat nanti. Misalnya dalam hal politik praktis, dengan kesadaran ini warga NU akan dengan mudah dapat menyatakan lebih memilih *sami'na wa atho'na* kepada para Muasis NU yang telah memberi landasan nilai-nilai dan teladan moral Jam`iyah, bukan pada pribadi-pribadi tokoh yang tidak berpehang pada kaidah-kaidah ahlak luhur.
4. Dalam tubuh Jam`iyah NU sudah saatnya melakukan perubahan secara mendasar terkait mentalitas ketika berhadapan dengan godaan materi dan kekuasaan. Keteladanan sikap hidup para Muasis dengan keihlasan dan kezuhudan mereka perlu selalu dihidupkan. Warga NU pada semua lapisan memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan para pemimpinnya sebagai bagian dari wujud kecintaan pada NU, bangsa dan negara;

5. Lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU perlu melakukan reformasi pendidikan agar ilmu yang ditumbuhkambangkan tidak sekedar berhenti pada ranah kognitif, tetapi juga harus siap menghadapi persoalan-persoalan konkret di masyarakat. Pendidikan dalam lembaga-lembaga pendidikan NU perlu dikuatkan sebagai proses yang memperkuat transormasi sosial-keagamaan menuju masyarakat yang adil, damai, dan beradab berpijak pada nilai-nilai Aswaja an-Nahdliyah.

Ttd Pj Komisi B:

K. Aguk Irawan
Listia

Hasil-Hasil Komisi C
Demokrasi dan Desain NU Masa Depan

Komisi C berusaha menggali "Demokrasi dan Desain NU Masa Depan" untuk menemukan tatapan Masa depan NU yang sangat penting bagi generasi baru, dengan tetap berpijak pada Qanun Asasi, Khitah NU, dan AD ART. Dengan menggali pandangan-pandangan dari para peserta Komisi C, didapatkan kesimpulan-kesimpulan yang disepakati begini:

A. Konteks dan Problematika

NU merupakan kekuatan demokrasi di Indonesia yang berorientasi pada politik kebangsaan bukan politik kekuasaan. Komitmen NU untuk kembali pada Khittah 1926 pada muktamar 1984 menjadi tonggak sejarah penting bagi peran politik kebangsaan NU. Pada satu sisi, melalui Khittah, NU tidak terlibat dalam kontestasi elektoral. Pada sisi lain, langkah ini membuka jalan bagi NU sebagai kekuatan civil society dalam pilar demokrasi di Indonesia.

Orientasi pada politik kebangsaan merupakan kekuatan terbesar NU sebagai pilar utama demokrasi. Orientasi politik kebangsaan ini pula yang membuat NU berperan sebagai penjaga keberagaman untuk persatuan.

Peran politik sebagai penjaga resiliensi keberagaman dan persatuan ini semakin sentral di tengah dinamika geopolitik kawasan dan global. Dengan kata lain, meneguhkan dan menjaga Khittah merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga NU sebagai kekuatan demokrasi dan kebangsaan.

Saat ini, demokratisasi dan desentralisasi membuat lokus kontestasi kekuasaan semakin kompleks. Dalam kondisi ini, warga nahdlyin kerap gamang dan menjadi objek dalam kontestasi kekuasaan—baik pemilu nasional maupun pilkada. Liberalisasi politik pasca-Orde Baru—yang ditandai oleh lahirnya pelbagai partai politik—mendorong warga nahdyyin menyalurkan aspirasi melalui ragam kendaraan partai politik. Realitasnya, banyak kader dan aktivis nahdyin berada di hamper seluruh partai politik di Indonesia. Pada satu sisi, ragam kendaraan politik ini membuat suara NU tidak pernah bisa tunggal. Namun, pada sisi lain ragam kendaraan ini membuka agenda dan aspirasi nahdyyin dapat lebih efektif disalurkan dalam politik pembuatan kebijakan.

Namun, nyatanya tidak mudah membangun NU sebagai kekuatan sosial yang otonom. Hal ini terkait dengan persoalan kemandirian, khususnya secara ekonomi, yang membuat NU relatif bergantung pada sumber daya negara. Persoalan otonomi ini juga akibat manuver politik para elit pimpinan baik di pusat maupun di daerah. Akibatnya, NU sebagai gerakan seringkali dipolitisasi dan diinstrumentalisasi untuk kepentingan kontestasi kekuasaan. Bahkan, NU pun kerap menjadi kendaraan politik individu atau kelompok non-nahdyyin.

Lebih jauh lagi, pemihakan NU secara struktural dalam politik electoral bukan hanya melanggar

komitmen Khittah. Pemihakan dalam politik electoral membahayakan NU sebagai kekuatan penting dalam politik kebangsaan dan demokrasi. Melalui komitmen Khittah lah NU menjadi "paying" bagi semua. Dengan pemihakkan politik NU bukan hanya tidak bisa memayungi semua—tetapi juga di kalangan nahdyyin sendiri. Bahkan, kelompok masyarakat yang berbeda pilihan dianggap sebagai "yang lain" atau dieksklusi.

Sebagai gerakan, kelompok-kelompok nahdyin di akar rumput telah aktif dalam politik advokasi di ragam isu. Akan tetapi, seringkali aspirasi politik di ranah civil society tidak sambung dengan dinamika dalam political society—khususnya dalam politik pembangunan—yang membuat proses advokasi kurang efektif. Akibatnya, seringkali masyarakat nahdyin di akar rumput menjadi korban pembangunan. Bahkan, ketika elit NU melakukan manuver politik, gerakan akar rumput yang terdampak tidak menemukan perlindungan dan saluran advokasi yang efektif.

Transformasi sosial konstituen NU juga perlu mendapat perhatian, baik dalam aspek sektoral maupun generasional. Perubahan sosial ini, terutama terkait transformasi digital, memerlukan cara baru untuk merancang NU agar selalu relevan dan responsif terhadap perubahan sosial konstituennya. Tanpa ada penyesuaian, NU akan kehilangan relevansinya bagi generasi-generasi muda yang secara demografis sangat sentral. Hal ini juga penting bagi NU untuk kaderisasi kepemimpinan dan talent management. Selain itu, ranah digital menjadi arena kontestasi wacana penting yang berpengaruh pada afiliasi dan kaderisasi NU di masa kini dan masa mendatang.

Dalam beberapa waktu terakhir, NU juga mengalami internasionalisasi. Secara sosiologis, hal ini terkait dengan semakin besarnya diaspora nahdyin di luar negeri baik untuk pendidikan, bekerja atau migrasi. Diaspora NU perlu mendapat perhatian agar ia dapat menjalankan perannya di pelbagai belahan dunia dan berkontribusi ke dalam negeri. Memang peran NU struktural dalam kancah internasional juga semakin kuat. Akan tetapi, sejauh ini peran-peran tersebut—misalnya promosi Islam moderat dalam diplomasi Indonesia—lebih bersifat elitis dan kurang mencerminkan kepentingan dan proyeksi nahdyyin di akar rumput. Advokasi terhadap isu-isu seperti perlindungan pekerja migran maupun fasilitasi UMKM nahdyyin dalam diplomasi ekonomi belum tergarap optimal.

B. Rekomendasi-Rekomendasi

Berdasarkan konteks dan problematika di atas, kami merekomendasikan NU untuk:

1. Meneguhkan Khittah sebagai fondasi NU untuk politik kebangsaan dan pilar demokrasi di Indonesia. Pemihakan dalam politik elektoral bukan hanya melanggar Khittah tapi sangat destruktif yang membuat NU kehilangan legitimasi dan kapasitas sebagai kekuatan pemersatu.
2. Membangun otonomi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil dan demokrasi. Kemandirian ekonomi merupakan faktor kunci dalam membangun NU sebagai kekuatan otonom, sementara manuver politik akan beresiko menciptakan konflik kepentingan yang akan merusak NU secara

organisasi, nahdlyin dan bangsa.

3. Memperbaiki manajemen dan tata kelola NU. Sebagai gerakan NU relative efektif namun sebagai jamiyyah ia tidak efektif. Hal ini terkait kepemimpinan NU untuk mengoptimalkan kekuatan-kekuatan nahdyin di daerah-daerah dan di kalangan muda. Kalangan muda perlu diberi peran yang lebih besar dan inisatif-inisiatif mereka perlu didukung. Kultur kaderisasi yang dogmatis perlu ditinggalkan karena menjauhkan NU dari kalangan muda.

4. Menguatkan peran NU dalam politik kemaslahatan. Fokus perjuangan NU adalah pada upaya membangun umat. "Kebangkitan" orientasinya harus bottom-up, bukan top down. Ketika komitmen pada politik kemaslahatan menurun dan orientasi politik kekuasaan meningkat maka NU menjadi sangat elitis. Lebih buruk lagi, karena konflik kepentingan, ia malah dapat berhadapan dengan kepentingan nahdyyin akar rumput.

PJ Komisi C

K.H. Imam Baihaqi
Dr Luqman-nul Hakim
Dr Ahmad Munjid

Komisi D
Ulama dan Nilai-Nilai Keulamaan dalam Tradisi Aswaja

Komisi D berusaha menggali "Ulama dan Nilai-Nilai Keulamaan dalam Tradisi Aswaja" untuk menemukan hikmah pentingnya di dalam mengembangkan dan mengelola NU, dengan dipandu oleh Kepemimpinan Ulama yang diteguh oleh *Qanun Asasi*, Khitah NU, dan AD ART. Dengan menggali pandangan-pandangan dari para peserta Komisi D ini, begini:

A. Poin-Poin yang Disepakati:

1. Ulama sebagai pewaris para Nabi mengemban Misi Kenabian Semesta, bukan pada aspek genetiknya, tetapi misi profetik: sosial, ekonomi, hukum, budaya dan politik yang perjuangannya meliputi keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, kemanusiaan, dan cita-cita luhur agama Islam yang lain;

2. Ulama memiliki kekuatan tasawuf (spritualitas) dan *tazkiyat an-nafs* sebagai pondasi nilai-Nilai Perjuangan Kenabian Semesta;

3. Ulama terus menerus perlu membangun kapasitas diri dalam keilmuan dan pengamalannya.

4. Ulama meneladani Sifat-Sifat Nabi semaksimal mungkin yang ia mampu (*shidiq, amanah, tabligh,*

dan Fathonah) dengan mendukung kemaslahatan masyarakat; dan berani mengatakan kebenaran/ keadilan pada penguasa sebagai kritik pengingat (bukan berarti melawan penguasa).

5. Ulama tidak boleh berpuas diri dan terus menerus *muthala'ah* (belajar terus menerus) serta menjadi pembimbing umat.
6. Ulama senantiasa menjadi teladan dalam menyampaikan kebenaran (kapasitas, integritas keilmuan dan kepribadian).
7. Ulama sebagai Tiang Semesta menjadi penyeimbang tidak terkooptasi dan bisa menempatkan diri secara indepeden dan dependen di tengah masyarakat.
8. Ulama senantiasa al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma dan Qiyas sebagai landasan berpikir dan berperilaku.
9. Ulama adalah Penggerak kemaslahatan dan penjernih kekeruhan berpikir-bertindak di tengah masyarakat.

B. Penjelasan-Penjelasan

1. Latar Belakang

Pada saat-saat ini nama Ulama-Kyai mengalami banyak kemerosotan, karena banyak berita-berita mengaitkan Ulama-Kyai sebagai Timses Capres/ Cawapres, dan tentu berhubungan dengan hal-hal itu (logistik, uang, dan pemenangan); sebagian bahkan diberitakan menjadi corong kampanye politisi-politisi tertentu. Peran-peran Kebangsaan dan Kerakyatan Ulama terdegradasi oleh kehadiran dan praktik-praktik

penggalangan Timses Capres/Cawapres atau sejenis perilaku-perilaku dalam mobilisasi politik praktis.

Oleh karena itu tema ini hendak mencari beberapa pointers untuk menemukan Keulamaan ideal dan nilai-nilainya dari sudut Khazanah Aswaja, agar dapat dijadikan segenap elemen Nahdliyin.

2. Ulama dan Misi Kenabian Semesta

Berpijak pada riwayat yang disandarkan kepada Nabi berbunyi *al-ulama' waratsatul anbiya'.* Maka Ulama sebagai pewaris para Nabi, bukan terletak pada bagian genetik Nabi, tetapi pada misi profetiknya: melakoni khidmah sosial, ekonomi, hukum, budaya dan politik yang perjuangannya meliputi keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan, persaudaraan, pembebasan atas kaum *mustad`afin,* dan hal-hal lainnya yang luhur dalam Islam; dan diorientasikan untuk mempertinggi/memperdalam kesadaran tauhid manusia beriman kepada Allah.

Dengan demikian Ulama itu menjadi wakilnya Allah di muka bumi dengan mengemban misi-misi kenabian di dalam Jagad Semesta. Karena Ulama menggantikan tempatnya para Nabi, meskipun Ulama tidak mencapai derajat kenabian dan hanya dapat meneladani bagian-bagian tertentu dari para Nabi.

Untuk menyangga peran Misi Kenabian di jagad semesta itu, keilmuan Ulama disangga melalui laku kekuatan tasawuf dan *tazkiyatun nafs* yang diambil dari guru-gurunya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad *shallahu `alaihi wasallam* (dan berhati-hati dalam mengambil ilmu dari seorang guru), sebagai pondasi nilai perjuangan semesta, yang dibuktikan melalui

tirakat lakunya disertai amal-amal perbuatannya: tidak menyimpang lisan dengan perbuatnnya; tidak menyimpang tulisannya dengan perbutannya; tidak menyimpang khutbahnya dengan perbuatannya; tidak silap nasihatnya dengan perbuatannya sendiri. Dengan kata lain Ulama tidak melacurkan ilmunya dan namanya.

Ketika nilai-nilai Keulamaan para Ulama goncang dan Tiang Ulama tidak sanggup menyangga peran-peran Keulamaannya, maka dapatlah dikatakan bahwa semesta juga ikut goncang. Goncangnya semesta adalah dicabutnya ilmu, akhlak, dan nama ulama semakin tidak berharga, dan tidak memiliki kewibawaan sehingga keburukan-keburukan menjadi semakin merajalela dan dibenarkan. Ketika Ulama sebagi pemandu di tengah masyarakat, pemimpin pemikir, dan penggerak yang meneladankan dengan akhlak-akhlanya mengalami kegoncangan karena kerusakan-kerusakannya, sungguh menjadi tanda rapuhnya penyangga semesta; dan pertanda bahwa sudah waktunya merancang penggantian-penggantian/regenerasi di dalam Keulamaan di tengah masyarakat.

Ilmu-ilmu yang bermanfaat adalah konsen Ulama. Ilmu-ilmu adalah pilar penting seorang Ulama, seperti ada yang berkecimpung di bidang fiqh, teologi, lingkungan, tafsir Al-Quran, tafsir hadits, kedokteran, dan lainnya. Di dalam ranah Keilmuan itu Ulama harus senantiasa membangun kapasitas pribadinya secara mencukupi disertai penjagaan muru'ah, mengerti tentang kemashalahatan umat, dan pengamalan ilmunya.

Penyibukan atas ilmu-ilmu yang demikian juga mengharuskan disangganya etika-etika keilmuan, dan tinjauan-tinjaun atas masalah-masalah social-kemasyarakatan berdasarkan keilmuannya, yang

diorientasikan sebagai pelayananan kepada Allah, wasilah pengabdian kepada ummat-negara-bangsa; dan disangga dengan kuatnya menangggung segala cobaan dan penderitaan sebagai ujian (*tahammulul adza*). Ulama tidak boleh melacurkan ilmunya, menjadikan ilmunya hanya menjadi Humasnya para politisi-politisi pragmatis, atau untuk deal-deal transaksional kekuasaan, pengejaran jabatan-jabatan kekuasaan, atau bahkan ketenaran-ketenaran. Imam al-Ghazali menyebut yang terakhir ini bagian dari Ulama Su' di dalam kitab-kitabnya.

Ulama sebagai pewaris para Nabi, dan di dalam konteks Islam menjadi penerus misi Nabi Muhammad yang *rahmatan lilamain* atau *rahmatan mahdatan*, dengan demikian mengharuskan memiliki karakter yang terus menerus dibentuk agar bersifat dan mendekati untuk memiliki sifat-sifat kenabian*: shidiq, amanah, tabligh, fathonah* dan sifat-sifat luhur lainnya. Sifat-sifat ini mewujud dalam perilaku dan sifat Ulama, karena sudah menjadi karakternya, untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara, dan berani mengatakan kebenaran/keadilan pada penguasa yang *zhalim* dan *jurr*, sebagai *tawashau bil haqq* (bukan berarti melawan penguasa).

Ulama selalu menghindari bercampur terlalu dalam dengan penguasa/politisi, tidak menjadi humas-humas politisi pragmatis, dan Humas pemerintah, sehingga tidak lagi bisa dibedakan: mana akhlak politisi-politisi dan mana akhlak ulama, tidak bisa dibedakan mana Ulama dan mana politisi pragmatis. Ulama boleh dekat dengan pemerintah/*umara'* sejauh untuk mengusahakan nasihat-nasihat dan pencapaian kemaslahatan bangsa, umat dan negara, bukan untuk deal-dealan transaksional. Akan tetapi Ulama Aswaja juga tidak melakukan *bughat*

kepada pemimpin yan diangkat Kaum Muslimin: kritinya adalah nasihat-nasihat yang terus menerus dilakukan sambil bermunajat agar diberi umara' yang dapat menegakkan kemaslahatan bansga, umat, dan negara. Yang diperkenankan adalah *tawashau bil haq* dan *bish shabr*, merahmati, dan selalu munajat untuk kebaikan bangsa, masyarakat, dan Kaum Muslimin.

Ulama selalu tidak berpuas diri dengan ilmu yang dimilikinya (karena ia selalu merasa bodoh setelah berkecimpung dalam banyak keilmuan), harus terus menerus belajar/*muthala'ah*, mengadu kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya (dalam tulisan, lisan, dan perlakunya), dan tidak boleh berhenti menularkan kemanfaatan ilmunya kepada manusia lain. Akan tetapi yang lebih penting dari ilmu, adalah ulama berilmu yang beramal dan bersambung dengan Ruh Kanjeng Nabi Muhammad dan akhlak-akhlak beliau.

Ulama juga perlu awas atas hal-hal baru yang berkembang, tetapi juga tidak perlu bersifat anti atas hal-hal baru. Hal-hal baru yang buruk atau hal-hal kini yang berlangsung, seperti pencapian keulamaan diukur dengan seberapa banyak kawan-kawan pejabatnya, seberap seringnya bisa duduk di meja makan dengan mentri dan presiden, seberapa besarnya bangunan pesantren bisa didirikan, dan seberapa besar viralnya di medis sosial, adalah racun yang merusak Keulamaan. Karena Ulama bukanlah Youtuber pengejar viral. Di tengah hal-hal baru dan kekinian yang terus berjalan, Ulama tidak akan guncang karena kokohnya iman, bersambungnya dengan akhlak-akhlak baik dari Al-Qur'an, Sunan Nabi, dan Uswah para *masyayikh*.

Ulama yang demikian, disebut oleh Al-Qur'an adalah maqam mereka yang berkecimpung dalam hal-hal keilmuan dan telah memiliki *khasyah* kepada Allah

seperti disebut oleh Al-Qur'an (*innama yaskhallah min Ibadihil Ulama,* QS. Fathir [27: 38), selalu mawas diri agar tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan tercela, karena merasa selalu diawasi oleh Allah; dan Ulama-ulama Rabbani karena selalu mengajarkan nilai-nilai Al-KItab/Al-Quran, Sunnah Nabi dan teladan-teladan para *masyayikh* di tengah masyarakat, sehingga Ulama tersebut sekaligus meneladankan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Rekomendasi-Rekomendasi

Oleh karena itu, Komisi D merekomendasikan tentang Ulama dan Nilai-Nilainya berdasarkan Penggalian Khazanah Keaswajaan, yaitu:

- Menjadi uswah bagi masyarakat dengan akhlak-akhlaknya yang baik, tidak memberi teladan Keulamaan hanya sebagai Humas-Humas politisi dan penyetempel semua kebijakan negara tanpa ada peninjaun secara kritis berdasarkan ilmu keulamaannya;
- Berani menyampaikan kebenaran berdasarkan kapasitas, integritas keilmuan, dan kepribadiannya sebagai pewaris para Nabi;
- Tidak terkooptasi, bisa independen dan dependen, agar dapat memberi nasehat, dan pada saat yang sama memperkuat hal-hal yang baik untuk kepentingan masyarakat dan bangsa;
- Agar senantiasa ingat pesan Imam al-Ghazali, *fasadat ar-rai`yah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil*

ulama (rusaknya rakyat/masyarakat jarena rusaknya para pemimpin, dan rusaknya pemimpin karena sebab rusaknya akhlak ulama) dan terus menerus menafakkurinya, agar bangsa Indonesia, masyarakat Nahdliyin dan Jam`iyah NU, dijauhkan dari para ulama yang menjadi sebab rusaknya para pemimpin negara dan menjadi wasilah rusaknya rakyat banyak;

- Kuat mengampu *maqam*-nya, seperti mengajar-menulis-khutbah-ngaji, mengerakkan masyarakat, dan menyebarkan ilmu untuk memberikan penjernihan kesadaran orang-orang yang beriman di tengah berbagai guncangan hidup;
- Meneladankan kuatnya menanggung, menyangga, dan mengembangkan nilai-nilai Ahlusnnah Waljamaah, termasuk dalam *tahamulul adza,* di tengah msyarakat yang terus menerus berubah, di tengah turbulensi sosial dan politik;
- Menimbang dengan sangat kriteria-kriteria Ulama Akhirat dari Imam al-Ghazali, dan hendaknya menjadi bahan yang dapat ditafakkuri bersama dan dicontoh, yaitu:
    1. Tidak menggunakan ilmunya untuk mencari keduniaan;
    2. satunya ucapan dan perbuatan;
    3. Jiwanya tertuju pada ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat dan mendorong perbuatan yang baik;
    4. Tidak tertarik pada berbagai jenis makanan dan minuman, pakaian mewah, rumah dan mebeler, tetapi lebih tertarik pada kesederhanaan dalam setiap hal tersebut karena mengikuti par a ulama salaf dan merasa cukup dengan yang tersedikit dalam setiap hal itu;
    5. Menjaga jarak dengan para pemegang

kekuasaan dan menghindari bersekutu dengan mereka, karena dunia ini lezat, selalu indah dan tali-talinya berada dalam kendali mereka;

6. Tidak memberi fatwa (putusan hukum) agama secara terburu-buru, tetapi tetap kukuh menjaga diri dari memberi fatwa selama masih ada jalan untuk melepaskan diri;
7. Perhatian utamanya adalah mempelajari ilmu batin (tentang rahasia-rahasia), membersihkan hati, menuntut ilmu untuk mengenal jalan menuju akhirat, bagai mana menempuhnya dan berusaha menegakkan *mujahadah* dan *muraqabah*, karena mujahadah mengantarkan kepada *musyahadah* atau kontemplasi (menyaksikan) dan memancarkan mata air kebijaksanaan melalui keterperincian pelik pengetahuan tentang hati;
8. Senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam upaya memperteguh dan memperkuat iman karena iman yang teguh adalah fondasi agama;
9. Rendah hati (tawadhu‘) dan lebih suka mengambil sikap diam;
10. Mereka belajar ilmu praktis dan menghindari ilmu yang merusak amal, yang membuat hati gelisah dan cemas, dan yang mengobarkan kejahatan;
11. Menyandarkan dan menggantungkan diri pada pengetahuan yang menerangi serta mencerahkan hati, bukan pada kitab-kitab dan apa yang dipelajari dari orang lain;
12. Dan selalu berusaha menyelamatkan diri-

sendiri dari hal-hal baru sekalipun kaum Muslim umumnya bersepakat pada hal-hal baru itu.

Ttd PJ Komisi D:

KH. Abdul Muhaimin
K. Nur Khalik Ridwan
K. Mathori al-Wustho

HASIL-HASIL KOMISI E
Politik Uang dalam Masyarakat Kita Menurut NU

Komisi E berusaha menggali "Politik Uang dalam Masyarakat Kita Menurut NU" untuk menemukan hikmah pentingnya di dalam mengembangkan kultur masyarakat yang anti politik uang, dengan dipandu oleh Kepemimpinan Ulama yang diteguhkan oleh Qanun Asasi, Khitah NU, dan AD ART. Dengan menggali pandangan-pandangan dari para peserta Komisi E ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Politik Uang

Politik uang adalah praktik pemberian atau janji menyuap seseorang untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Politik uang di Indonesia bermula dari masa penjajahan Belanda, ketika mereka mengangkat kepala desa yang loyal kepada mereka dengan cara memberikan uang atau barang. Politik uang kemudian berlanjut hingga masa kemerdekaan, dengan berbagai bentuk dan modus yang berubah-ubah hingga "membudaya". Di banyak ruang pemilihan pimpinan organisasi, politik uang banyak

ditemukan. Pun dalam setiap pemilihan umum yang terjadi setiap 5 tahun sekali atau pemilihan kepala desa setiap 6 tahun sekali.

Politik uang sering disebut juga sebagai serangan fajar, karena biasanya dilakukan pada malam hari menjelang hari pemungutan suara. Serangan fajar meliputi pemberian uang, sembako, atau barang lainnya kepada masyarakat agar memilih calon tertentu. Saat ini politik uang berkembang dalam berbagai bentuk, antara lain: mahar, perbaikan fasilitas publik, door prize dan bentuk lain untuk mempengaruhi pemilih.

B. Hukum Politik Uang

Hukum suap atau risywah di dalam Islam adalah haram dan termasuk dosa besar. Suap bagian dari politik uang, yaitu pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan maksud meluluskan perbuatan tercela, menjadikan salah perbuatan yang sebetulnya sesuai syari'ah, atau mempengaruhi keputusan yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan.

Suap dapat merusak tatanan sosial, menghilangkan hak-hak orang lain, dan menimbulkan ketidakpercayaan dan kebencian. Suap juga dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan, dan menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Dalil-dalil yang melarang suap di dalam Islam antara lain:

1. Surat Al-Baqarah ayat 188:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

2. Surat Al-Ma'idah ayat 42:

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram."

3. Hadits

"Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

C. Pertimbangan-Pertimbangan yang Disepakti

1. Praktik politik uang (money politics) telah merusak tatanan demokrasi dan kehidupan Indonesia sebagai negara-bangsa. Pengalaman praktik demokrasi di Indonesia hanya memastikan orang yang punya uang atau orang yang bisa mengumpulkan dana dari para lah yang kapitalis akan menjadi pemimpin politik. Maka, gerakan melawan politik uang dapat dimulai dengan membangun kepentingan bersama dan menjadikan politik uang sebagai ancaman bersama,

kejahatan sistematis, terstruktur, dan masif sehingga bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa;

2. Kualitas demokrasi adalah pertemuan antara tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Realitasnya, Peraturan Perundangan yang memberikan biaya untuk pelaksanaan Pemilu sebagai jalan meminimalisir politik uang ternyata tidak dapat dilaksanakan / tidak operasional (tidak ada enforcement of the law).
4. Kaderisasi di tingkat partai politik yang gagal membuat pencalonan pemimpin di berbagai lini tidak diisi oleh kader yang kompeten. Justru, pencalonan diisi oleh job seeker dan pihak yang memiliki kekayaan serta berafiliasi dengan oligarki.
5. Pengalaman di Batang (2011) memberikan penjelasan bahwa yang ada di selain sistem politik yang memungkinkan orang baik menjadi pemimpin, sepertinya masih diperlukan aktor baik untuk menjadi prototipe politisi yang baik.
6. Sistem politik yang tidak nyambung dengan kesejahteraan, menumbuhkan ketidakpercayaan konstituen politik pada politisi.
7. Politik uang telah merambah ke dalam NU sebagai Jam'iyah baik sebagai penerima maupun pelaku, secara terangan-terangan maupun diam-diam.

D. Rekomendasi-Rekomendasi

1. Bahwa dari sisi fiqh bahwa politik uang adalah bagian dari risywah/ suap. Baik yang melakukan dan

yang menerima akan dikenai hukum (termasuk di dalamnya adalah mahar politik, praktik pemberian sembako di luar aturan) baik yang dilakukan sebelum (ijon) dan sesudah Pemilu yan dilakukan oleh calon.

2. Strategi untuk minimalisir politik uang dilakukan dengan mengkaji ulang sistem politik, yang salah salah satunya adalah mereformasi sistem kepartaian agar berfungsi dengan baik (UU Parpol, Pemilu, dll.). Sistem harus dapat menjamin orang baik bisa memimpin (tidak hanya yang bisa memberi uang saja yang dapat memimpin);
3. Proses restrukturisasi di level kepemimpinan mulai dari desa sampai pusat dengan mendorong peran serta masyarakat sipil/ormas untuk menjadi bagian dari penegak demokrasi yang bermartabat;
4. Menegaskan kepada Nahdliyin di manapun untuk tidak mempraktikkan politik uang dan menolak serta melawan politik uang.

Ttd PJ Komisi E

Wasingatu Zakiyah
Saiful Huda Shodiq
AS Burhan
Sri 'Nehik' Hidayati

Wirid Amplop*)

K. Mathori A Elwa

tiba-tiba
amplop amplop menjelma
gedung-gedung
tambang
mobil-mobil
dan perabot rumah tangga

amplop-amplop jadi sarapan, makan siang dan malam
kami

amplop-amplop
adalah minuman, cemilan
darah dan daging kami

dan engkau
sebagai jamaah dan rakyat jelata hanya
bisa menatap nganga
dan bertanya:
kok bisa?

kang ad/art, mbah kanun asasi, paman khittah 1926,
abah marwah dan nyai peduli
ada di mana kini?

Pernyataan Cinta untuk NU*)

K. Aguk Irawan

NU, Jam`iyah yang yang menyimpan banyak kisah keteladanan dan kepahlawanan;

Tentang kebersahajaan dan kearifan Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Halim, Mbah Dahlan, Mbah Ma'shum dan para muasis lainnya;

Tentang perjuangan bermadzhab, ber-Aswaja sampai Tanah Suci Makkah negeri baginda dan kemerdekaan bangsa manapun yang terjajah;

NU, tempat berkumpulnya para Mujahid yang gigih dan tak kenal menyerah, Resolusi jihad menjadi lecut semangat berjuang hidup atau mati;

Di sana pejuang Hizbul Wathan, Hizbullah dan Sabillah mempertaruhkan darah, airmata, dan nyawa demi merah putih;

NU, dilahirkan lebih dari cita-cita untuk bangsa merdeka, tapi juga sebagai pengawal kemerdekaan demi *baldatun tayibatun warrabul ghafur*;

NU, tempat munculnya kader-kader militan merah putih, *Yalal Wathan* sebagai panji dan kekuatan bangsa yang besar dan tak lekang oleh zaman;

NU, banyak kisahmu, dari ikut mendirikan partai Masyumi, menjadi partai sendiri, fusi dan kembali ke Khittah NU sam-

pai turun ke jalan saat reformasi adalah pelita di nanar mata rakyat yang sengsara;

Aduhai, elok dan gigih juangmu;

Makmur rakyatmu, adil bangsamu adalah cita-citamu yang tak pernah padam hingga detik ini;

NU, kini terus tumbuh besar, bahkan meluas sampai pelosok Papua dan ujung Tanah Rencong, bahkan terus menyebar sampai Negeri Jiran bahkan luar negeri;

Aduhai, ini rahmat dan berkah dari Allah buah dari perjuangan Muasis yang tirakat dan riyadlah, yang tak kenal henti dan peluh dari para pejuang yang tak rela bangsanya dihabisi;

Para pejuang itu, adalah mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah, panji Islam Ahlusunnah Waljama`ah, dan merah putih.

Aduhai NU-ku, NU-kita, kini;

Setelah satu abad lebih engkau mengabdi, diam-diam ada memang rayap yang tersembunyi di dalam kokohnyan kayu dan papan;

Aduhai, ada juga yang sembunyi-sembunyi berperan bak makaler. Ingin menjual dengan menggelar lapak sesukanya. Menimbang-nimbang dengan harga yang tak pantas atas nama Jam'iyah. Demi Allah, kami kami tak terima!

Kampung Mataramanm, 28 Januari 2024.

Aguk Irawan

)Dibacakan di sesi akhir Mubes Nahdliyin Nusantara.

Pernyataan Sikap Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara

Setelah melakukan musyawarah, Nahdliyin Nusantara di Kampung Mataraman pada 28 Januari 2024, dengan mencermati perubahan perubahan yang terjadi di Jam`iyah dan bangsa, ditinjau dari berbagai aspek keilmuan, dasar bersama Khitah NU, AD/ART, Qonun Asasi, dan Uswah-uswah dari para Masyayikh Nahdlatul Ulama, Kami bersikap:

1. Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU.
2. Konbes dan Harlah hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jam'iyyah NU, bukan menjadi alat mengorganisir dukungan kepada salah satu Paslon dalam Kontestasi Capres-Cawapres untuk pemilu 2024, sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti Kemandirian Jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain;
3. Memohon kepada Pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon capres-cawapres yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misinya, dan tidak memihak kepada salah satu paslon sebagai amanah dari Khittah NU. Pemihakan kepada salah

satu paslon yang dilakukan oleh Jamiyah Nu merupakan pelanggaran atas Khittah NU.

4. Memohon kepada Pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kyai untuk tidak jatuh kepada maqam politisi-politisi dan politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.
5. Memohon kepada Pengurus NU untuk mengembalikan marwah Jamiyah di tengah berbagai benturan dan turbulensi politik, sehingga sebagian pengurusnya dicokok oleh KPK dengan cara membersihkan struktur NU dari bisikan-bisikan Politisi pragmatis dan tidak terlalu dekat dengan figur-figur politisi pragmatis.
6. Memohon kepada Pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan;
7. Sesuai dengan prinsip politik atau asas politik ASWAJA, karakter kepemimpinan Jam'iyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kyai-kyai di daerah. Kepemimpinan Jam'iyah NU adalah kepemimpinan partisipatif bukan kepemimpinan rezim dan perorangan yang dipaksakan sehingga setiap keputusan organisasi/ jam'iyah seyogyanya diambil secara partisipatif dan terbuka dengan berpijak pada Khittah NU dan Qonun Asasi serta AD ART.
8. Kami memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.
9. Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan

aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah.

Dengan memohon pertolongan Allah dan wasilah para pendiri NU, apa yang menjadi keprihatinan kami ini semoga dapat menggugah para Nahdliyin di seluruh Nusantara.

Yogyakarta, 28 Januari 2024

Mubes Nahdliyin Nusantara

Hasan Bashri Marwa
(Koordinator)

Panitia Mubes Nahdliyin Nusantara, 28-29 Januari 2024

Penasehat

KH. Asyhari Abta
KH. Chaidar Muhaimin
KH. Abdul Muhaimin
Prof. KH. Nadirsyah Hosen
KH. Nawawi Yasin
K. Marzuki Kurdi
KH. Imam Aziz
Dr. Ghafar Karim

Koordinator Pelaksana

TG. Hasan Bashri Marwah

Anggota-anggota (Sekaligus Tim Materi)

Nur Khalik Ridwan (Koord)
K. Aguk Irawan
K. Mustafid

Mathori Al Wustho
K. Waidl
K. Imam Baehaqi
Listia Suprobo
Anisatul Azizah
Nur Jannah
Titi Fatiha
Wasingatun Zakiah
Mustaghfiroh Rahayu
Nidaus Saadah
Saiful Huda Shodiq

Bendahara

Sugiharto el Zuhri

Sekretaris

Zuhdi Abdurrahman

Data dan Kampanye

Ismahfudi

Tim Teknis

Angga
Fadhli
Ilham

Kafabih
Nasih
Nafisa
Odenk
Muslih
Wahyu Saefudin

Tempat:

Kampung Mataraman, Bantul Yogyakarta

Tanggal Pelaksanaan:

28-29 Januari 2024

Kegiatan Acara:

Musyawarah Besar (MUBES) Nahdliyin Nusantara

Tempat :

Kampung Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY.

Peserta yang hadir:

380-an orang dari berbagai wilayah dari Jawa-Madura, Luar Jawa, dan Luar Negeri. Khusus dari Luar negeri

(PCINU Australia 3 orang, PCINU Sudan 1 orang, PCI-NU Amerika 1 orang, dan PCINU Jepang 1 orang).

Kas Masuk dan Keluar Mubes Nahdliyin Nusantara

TGL	MASUK	KELUAR	RINCIAN	SALDO
1	3	4	5	6
23-Jan	500,000		TfImamAzis	500,000
23-Jan	500,000		TfSoegi	1,000,000
23-Jan	1,000,000		TfMarkijok	2,000,000
23-Jan	200,000		Tf Wasingatu Zakiyyah	2,200,000
23-Jan		2,200,000	TfZuhdyGiatPraMubes	0
23-Jan		2,500	BiayaTfZuhdy	-2,500
23-Jan	500,000		TfBaehaqi	497,500
23-Jan	500,000		TfNKR	997,500
24-Jan	500,000		TfYusufMurtiono	1,497,500
24-Jan	350,000		TfAinulYakin	1,847,500
24-Jan	500,000		TfKharisFadlan	2,347,500
24-Jan	500,000		TfAguk	2,847,500
24-Jan	500,000		Tf RifqiAzis	3,347,500
24-Jan	500,000		TfSalsabilaRN	3,847,500
24-Jan	500,000		TfAfifKhoiri	4,347,500
24-Jan	15,000,000		TfRizkiAF	19,347,500
24-Jan	500,000		TfShofiyullah	19,847,500
25-Jan	200,000		TfMasnunah	20,047,500
25-Jan	1,009,000		TfMunawirS	21,056,500

25-Jan	250,000		TfListia	21,306,500
25-Jan		1,500,000	ByrKaranganBunganan. Nafisa	19,806,500
25-Jan		2,500	BiayaTfKarangan Bunga	19,804,000
25-Jan		1,974,000	CetakBaliho,Rontek,dll	17,830,000
25-Jan	2,000,000		TfNurudinAmin	19,830,000
25-Jan	2,000,000		TfTazkiyyaM	21,830,000
25-Jan		120,000	KonsumsiRapatRmhSoegi	21,710,000
26-Jan	500,000		TfMaulani	22,210,000
26-Jan		9,795,000	DPKampMataraman	12,415,000
26-Jan		6,500	BiayaTfKampMataraman	12,408,500
26-Jan		4,000,000	TfZuhdyutkKeamanan	8,408,500
26-Jan		6,500	BiayaTfZuhdy	8,402,000
26-Jan		1,000,000	TfZuhdyutkTransportPanitia	7,402,000
26-Jan		6,500	BiayaTfZuhdy	7,395,500
26-Jan	2,000,000		TfYudistira/LulukNH	9,395,500
26-Jan	300,000		TfNidausSaadah	9,695,500
27-Jan	1,000,000		TfDennyS	10,695,500
27-Jan		2,900,000	TfNafisahutkBanerdanAcara	7,795,500
27-Jan		2,500	BiayaTfNafisah	7,793,000
27-Jan	50,000		TfTirtoPunto	7,843,000
27-Jan		633,100	KonsumsiRapatMataraman	7,209,900
27-Jan	500,000		TfFahsinF	7,709,900
27-Jan	250,000		TfSriHidayati	7,959,900

27-Jan	500,000		TfIzzulHaq	8,459,900
27-Jan	200,000		TfSaeroni	8,659,900
27-Jan	500,000		TfSalehuddin	9,159,900
27-Jan	500,000		TfGhozi	9,659,900
28-Jan	100,000		TfHanif	9,759,900
28-Jan	400,000		TfImroatulAzizah	10,159,900
28-Jan		800,000	TfKafabiPasangPoster,spandukdll	9,359,900
28-Jan		2,500	BiayaTfKafabi	9,357,400
28-Jan		1,602,500	BiayaTransportMediaHariHMubes	7,754,900
28-Jan		500,000	TransportMediaLokal	7,254,900
28-Jan		1,622,500	BiayaPenginapanTheRatanHomestay	5,632,400
	1,620,000		RefunddariKampungMataraman	7,252,400
28-Jan		2,052,400	ProduksiBookletRekomendasiMubes	5,200,000
28Jan		4,800,000	Transport12orangpanitia	400,000
28-Jan		400,000		0
				0
				0
				0
				0
				0
	35,929,000	**35,929,000**		**0**

Senarai Foto Dokumentasi